

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138.
- Alwahidi, M. R., & Darwanis, D. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 153.
- Annisa, R., & Murtini, H. (2018). Accounting Analysis Journal The Determinant of Regional Financial Information Transparency on the Official Website of Local Government. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 43–51.
- Aronmwan, E. J., & Asiriwa, O. (2018). Online Financial Disclosures in The Nigerian Public Sector. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 5(4), 257–270.
- Carpenter, V. L., & Feroz, E. H. (2001). Institutional Theory and Accounting Rule Choice: An Analysis of Four US State Governments' Decisions to Adopt Generally Accepted Accounting Principles. *Accounting, Organizations and Society*, 26(7–8), 565–596.
- Deegan, C., & Unnerman, J. (2011). *Financial Accounting Theory: European Edition*.
- García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, 36(5), 679–695.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gore, A. K. (2004). The effects of GAAP regulation and bond market interaction on local government disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 23(1), 23–52.
- Gupta, B., Dasgupta, S., & Gupta, A. (2008). Adoption of ICT in a government organization in a developing country: An empirical study. *Journal of Strategic Information Systems*, 17(2), 140–154.
- Hartono, Utomo, D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(April), 9–21.
- Hermana, B., Tarigan, A., Medyawati, H., & Silfianti, W. (2012). Information richness, website feature, and financial transparency on the local government website in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 43(2), 229–235.

- Indonesia, R. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000*.
- Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia, R. (2010a). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413.
- Indonesia, R. (2010b). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah, 71*, 160–173.
- Informasi, K. K. (2018). *Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KPTS/KIP-JTG/XI/2019 Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik 2018*.
- Informasi, K. K. (2020). *Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 02/KPTS/KI-JTG/XII/2020 Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik 2020*.
- Janie, A. D. N. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*.
- K, Styles, T. (2007). The accessibility of financial reporting of u.s. municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 19*(1), 56–92.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2010). Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. *Komite Nasional Kebijakan Governance*, 1–50.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy, 24*(2), 101–121.
- Martani, D., Fitriyani, D., & Annisa. (2013). Transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Pesat, 5*(10), 70–80.
- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerinah Di Indonesia. *Universitas Indonesia*.
- Moon, M. J. (2002). The evolution of E-government among municipalities: Rhetoric or reality?. *Public Administration Review, 62*(4), 424–433.
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *1*(6), 1–26.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research, 4*(1), 112–128.

- Nosihana, A. (2016). *Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. 3(2), 87–101.
- Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 186–193.
- Pemerintah, P. P. R. N. 24 T. 2005 tentang S. A. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. September, 1–2.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments?. *International Public Management Journal*, 13(4), 350–380.
- Prihanto, I. G. (2012). Analisis Implementasi E-Government Pada Pemerintah [ Analysis of the Implementation of E-Government on Regional Government Level in Indonesia ]. *Jurnal Analisis Dan Informasi Kedirgantaraan*, 1–16.
- Rachmat, D. M. (2019). *Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi*. 2, 1–13.
- Rahmawati, D. (2012). Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 5(1),
- Rasbin. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Di Tujuh Provinsi Pemekaran Di Indonesia*.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi* (Vol. 51, Issue 4, pp. 28–48).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah*. 55.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Undang-Undang*, 1–16.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Analysis of Effect of Characteristics of Government Regional Against Level Disclosure Reports Financial). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.

- Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika, 2008(semnasIF)*, 99–108.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suharko. (2005). Masyarakat Sipil , Modal Sosial dan Tata. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 263–290.
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43.
- Taufick, A. I. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal dan Belanja Modal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Provinsi Timur Tahun 2009-2013. *Jurnal Ilmiah*, 1–15.
- Utomo, K. C., & Aryani, Y. A. (2017). The Determinant Of Financial Disclosure on Indonesian LG's Website. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(1), 85.
- Wau, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4, Issue 4).
- Yogiswara, P. K., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2014). *Peranan E-Government Dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publk (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung)*.